

**ANALISIS KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN
SIMILLIR II DESA KARANG SIDEMEN KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF THE SEMILIR II
FOREST FARMER GROUP IN KARANG SIDEMEN VILLAGE CENTRAL
LOMBOK**

**Wawan Mulyanto, Andi Chairil Ichsan, dan Muhamad Husni Idris
program studi kehutanan universitas mataram
email: wawanp343@gmail.com**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kapasitas kelembagaan di HKm Karang sidemen mengacu berdasarkan P. 57 tahun 2014 yang di bagi berdasarkan kelas – kelas tertentu serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan data dengan teknik survei yang berpedoman pada kuisisioner. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa HKm karang sidemen dikategorikan sebagai kelas madya. Kelompok Tani Hutan Karang Sidemen telah melakukan berbagai kegiatan, memiliki kelengkapan organisasi dan memiliki wadah organisasi usaha kelompok walaupun belum berjalan serta administratif wilayah kelompok tani hutan sudah lengkap seperti peta kelola kawasan dan setiap anggota memahami batas- batas wilayah kelola.

Kata kunci : Kelas Madya, Kelompok Tani Hutan, HKm

Abstract

The purpose of this study was to analyze institutional capacity in HKm Karang Sidemen referring to P. 57 of 2014 which is divided based on certain classes and to find out the supporting and inhibiting factors in management in the area. This research uses descriptive methods and data collection with survey techniques guided by questionnaires. The results of the study state that HKm Karang Sidemen is categorized as a middle class. Karang Sidemen Forest Farmers Group has carried out various activities, has a complete organization and has a group business organization although it is not yet running and the administrative area of the forest farmers group is complete such as a map of the management area and each member understands the boundaries of the management area.

Keywords: Intermediate Class, The Forest Farmer Group, HKm

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (PKPS MENLHK, 2015). dimana salah satu pengelolaan yang sering dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan adalah Hutan Kemasyarakatan.

Hutan kemasyarakatan sendiri adalah satu dari tiga skema pengelolaan hutan *kolaboratif* yang dikembangkan oleh kementerian kehutanan bersama masyarakat. Salah satu provinsi yang telah melaksanakan praktik HKm adalah provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk daerah yang aktif mengusulkan penetapan areal kerja (PAK) untuk HKm. Data yang ada dalam kemenhut 2014 dalam Markum et. al. (2015), menunjukkan bahwa NTB telah mendapatkan penetapan areal kerja (PAK) seluas 24.601,5 ha,

dan 3 dari luas tersebut, sebesar 34,59% sudah ditindak lanjuti dengan penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) oleh bupati.

Pasang surut dalam implementasi Hkm di provinsi NTB merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Nandini (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa implementasi program HKm pada hutan lindung dan hutan produksi di pulau Lombok memang sudah memberikan dampak bagi masyarakat walaupun kontribusi yang diberikan terhaap pendapatan masyarakat oleh HKm belum dirasa optimal. Pendapat yang berbeda diberikan oleh markum et. al. (2015), program HKm sesungguhnya telah memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah rumah tangga miskin di NTB. Diperkirakan, dari seluruh jumlah penduduk miskin yang yang berhasil dientaskan selama 2009 sampai dengan tahun 2014 (dari 26% turun menjadi 17,24%), maka minimal 8,5% dari total penurunan tersebut, atau sebanyak 29,672 penduduk miskin telah dientaskan karena program HKm.

HKm karang sidemen merupakan salah satu bentuk bentuk perhutanan sosial yang menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) melalui program HKm yang berada di Kecamatan Batukliang

Utara yang memiliki PAK IUPHKm seluas 300 ha. Dimana didalam pengelolaanya dibentuklah KTH (Kelompok Tani Hutan) yang tergabung kedalam GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani Hutan) Wanalestari, salah satunya adalah KTH Semilir 2. Keberadaan KTH di kawasan tersebut diharapkan mampu mengelola kawasan di HKm tersebut sehingga HKm di kawasan tersebut mampu memberikan dampak yang signifikan dari segi ekologi, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat sekitar kawasan tersebut (PKPS MENLHK, 2015).

Sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung ke dalam kelompok tani di Karang Sidemen harus memiliki perencanaan dan pengorganisasian yang tepat, berdasarkan aspek kelola kelembagaan dan usaha di kawasan tersebut. Aspek kelembagaan dan aspek usaha merupakan hal yang memegang peranan penting dalam pengelolaan HKm. Hakim et al . (2010) menyebutkan Aspek kelembagaan menjadi penting dalam rencana pemberdayaan masyarakat di dalam dan disekitar hutan dan Aspek usaha memiliki peranan penting dalam tujuan pengelolaan HKm yang ingin mensejahterahkan masyarakat disekitar kawasan hutan yang ikut mengelola kawasan secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan usaha yang dilakukan

oleh masyarakat disekitar kawasan hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang berada disekitar kawasan hutan akan memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat.

Keberadaan HKm diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat disekitar kawasan hutan sehingga masyarakat sejahtera dan hutan dapat terus lestari. Nandini (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa aspek ekonomi (usaha) masih berada dalam kategori sedang dalam pengelolaan HKm di Lombok hal ini karena HKm belum memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan KTH dan masyarakat. Selanjutnya perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan KTH agar dapat mengkaji apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana dan tujuan yang ingin dicapai Maka perlu dilakukan penelitian Analisis Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Semilir 2 di HKm Karang Sidemen.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana kapasitas kelembagaan kelompok tani hutan Semilir 2 dalam pengelolaan HKm Karang Sidemen.

- 1.2.2 Apa saja factor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan kawasan HKm karang Sidemen.

1.3 Tujuan

- 1.3.1 Menganalisis kapasitas kelembagaan, wilayah dan usaha kelompok tani hutan Semilir 2 berdasarkan P.57/Menhut-II/2014.
- 1.3.2 Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan kawasan HKm Karang Sidemen.

III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti, melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya (Sugiono,2014). Pendekatan Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Siyoto, et al (2015), menyebutkan Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur,dihitung, serta dapat dideskripsikan menggunakan angka sedangkan data kualitatif adalah data yang menjelaskan suatu obyek berdasarkan hal-hal umumnya tidak dapat dihitung .

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dikawasan HKm Karang Sidemen Kabupaten Lombok Tengah. Lokasi ini sengaja dipilih sebagai lokasi penelitian karena HKm ini salah satu HKm yang terletak di provinsi NTB,selain itu HKm Karang Sidemen sengaja dipilih karena berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya HKm Karang Sidemen belum memberikan kontribusi yang besar terhadap taraf ekonomi masyarakat sekitar kawasan serta banyaknya permasalahan dari sisi aspek kelola dan kelembagaan seperti banyaknya pemegang IUPHKM memindah tangankan hak pengelolaan. Sebelum menjadi HKm, Kawasan Hutan Karang Sidemen merupakan kawasan hutan lindung. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merasa lokasi HKm Karang Sidemen sudah relevan dengan tujuan penelitian ini untuk melakukan Analisis Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani Hutan. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, dari bulan april sampai agustus tahun 2022.

3.3 Objek Dan Alat Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian yaitu masyarakat aktif anggota Kelompok Tani Semilir 2, pengurus dan anggota kelompok tani Semilir 2 yang aktif menggarapa lahan HKm karang sidemen dan terikat dibawah Gapoktan Wana lestari. Penelitian ini menggunakan lembaga pengelola (KPHL TASTURA) dan Masyarakat aktif yang tergabung dalam kelompok tani Semilir 2 sebagai unit analisis.

3.4 Metode Penentuan Sample Dan Responden

a. *Purposive Sampling*

purposive sampling adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Dimana semilir 2 dipilih karena semilir 2 merupakan KTH dengan jumlah populasi terbanyak dan pemegang wilayah paling besar. Sedangkan untuk penentuan responden terdapat pertimbangan tertentu dimana responden harus memenuhi kriteria diantaranya responden menjadi pengurus dalam KTH Semilir 2 dan anggota aktif (rutin mengikuti pertemuan kelompok, aktif menggarap lahan yang ada di kawasan).

b. *Sampling Qouta*

Sampling qouta adalah teknik untuk menentukan sample dari populasi yang mempunyai ciri- ciri tertentu sampai jumlah kouta yang diinginkan (Sugiyono, 2014). Dimana Populasi dalam penelitian ini berjumlah 81 orang yang diperoleh dari total keseluruhan anggota kelompok tani hutan Semilir 2. Untuk memperkecil jumlah sample digunakan *Snowball Sampling* Menurut Siyoto, *et al* (2015) adalah teknik penentuan sampel yang mula- mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu kemudian membesar. Atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Teknik penentuan sampel ini mewawancarai secara terus menerus sampai jawaban dari responden jenuh atau sama. Teknik ini juga sangat baik untuk digunakan dalam mewawancarai masyarakat mengenai tingkat kapasitas kelembagaan dikarenakan

sampel yang diwawancarai hanya sampel yang mengetahui dengan jelas tiap butir pertanyaan yang diajukan.

3.5 Metode Pengambilan Data

3.5.1 Kuesioner

Pengumpulan data melalui kuesioner atau angket. (Sugiono, 2014) menyebutkan bahwa sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpulan data.

Prosedur penyusunan kuesioner :

- a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner
- b. Mengidentifikasi variable yang akan dijadikan sasaran kuesioner
- c. Menjabarkan setiap varible menjadi sub variable yang lebih spesifik dan tunggal
- d. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus untuk menentukan tehnik analisisnya.

3.5.2 Observasi

Menurut sugiyono (2015) observasi sebagai tehnik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan tehnik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak

terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi berperan serta) dan non participant observation. Dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2015).

3.7 Variable Penelitian

variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan peraturan menteri kehutanan republik indonesia nomor 57 tahun 2014.

3.8 analisis data

penelitian ini menggunakan analisis data yaitu berdasarkan peraturan menteri kehutanan republik indonesia nomor 57 tahun 2014. Dimana Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil skoring mengenai evaluasi HKM berdasarkan pada peraturan menteri kehutanan republik indonesia No 57 tahun 2014 tentang pedoman pembinaan kelompok tani hutan yang telah disesuaikan dengan penelitian ini yaitu :

- a. Dibawah 350 : Kelas pemula
- b. 350- 700 : kelas Madya
- c. Diatas 700 : Kelas Utama

Bab III. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian

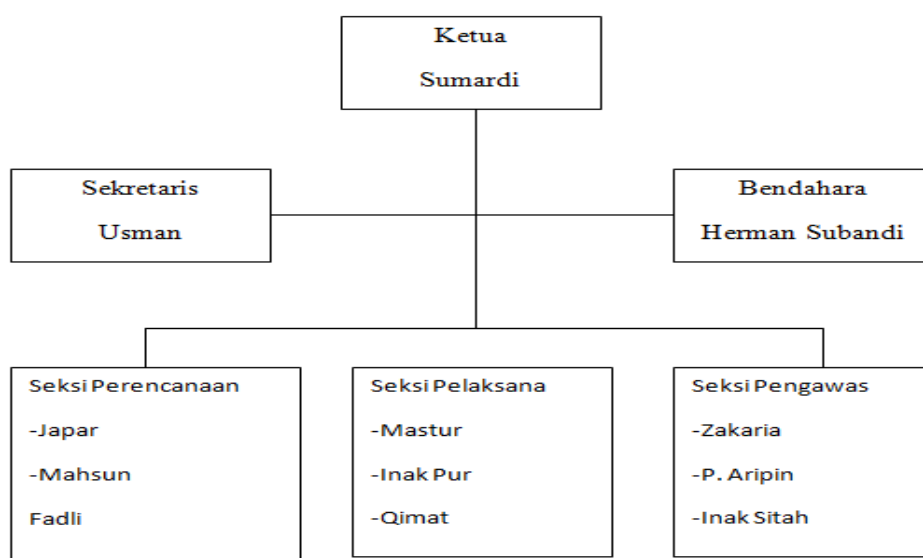
HKM karang Sidemen terletak di wilayah kerja BKPH Pelengan Tastura di kabupaten Lombok tengah, mempunyai luas area 300 Ha dengan fungsi hutan lindung (HL). Kawasan tersebut di kelola oleh 17 kelompok tani, yang tergabung kedalam gabungan kelompok tani hutan (GAPOKTAN) Wana Lestari.

Lokasi kawasan Kelompok tani hutan Semilir II berada di hutan lindung RTK 1 Gunung rinjani Desa Karang Sidemen, kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Areal ini secara fisik saat ini seluas 403 Ha, (Peta terlampir), dipergunakan untuk bercocok tanam dengan batas-batas areal sebagai berikut

Utara : Pakuan
Timur : Aik berik
Selatan : Lantan
Barat : Sedau

4.2 Profil Kelompok Tani Hutan Semilir II

Kelompok tani hutan Semilir II terbentuk dan disahkan pada tanggal 10 Januari 2022 berdasarkan Berita Acara dimana KTH Semilir II mempunyai anggota sebanyak 81 orang. Keanggotaan dalam KTH Semilir II terdiri dari ketua, wakil, sekertaris, bendahara, seksi perencanaan, seksi pelaksana, seksi pengawas dan anggota biasa. Berikut adalah struktur bagian dalam kepengurusan KTH Semilir II :



Gambar 4.1 Struktur kepengurusan KTH Semilir II

4.3 Karakteristik Responden

4.3.1 Umur Responden

Dalam Penelitian kali ini, Responden yang ada sejumlah 15 responden dengan rentang umur responden pada umur 24 sampai 46

tahun. Responden tersebut terdiri atas pengurus serta anggota KTH Semilir II.

Gambaran umur responden KTH Semilir II dapat di jelaskan ditabel

berikut :Tabel 4.1 Umur Responden

No	Umur	Jumlah	Persentase %
1	24 - 30 Tahun	3	20%
2	30 – 40 Tahun	10	67%
3	40 – 46 Tahun	2	13%
	Jumlah	15	100%

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa umur responden sebagian besar pada rentang 30

sampai 40 tahun, Sebagian besar responden berada di umur yang produktif. Putri , & Setiawina (2013) menyebutkan bahwa umur produktif

berkisar antara 15- 64 Tahun yang merupakan umur ideal bagi para pekerja. Dimasa produktif, secara umum semakin bertambahnya umur maka pendapatan akan semakin meningkat, yang tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Kekuatan fisik seseorang untuk melakukan aktifitas sangat erat kaitannya dengan umur karena bila umur seseorang telah melewati masa produktif, maka semakin menurun kekuatan fisiknya sehingga produktifitasnya pun menurun dan pendapatan juga ikut turun.

4.3.2 Tingkat Pendidikan Responden

Tabbel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	SD	1	7%
2	SMP	3	20%
3	SMA/SMK	11	73%
	Total	15	100%

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat bahwa sebagian besar responden mencapai tingkat pendidikan (SMA) dengan jumlah 11 orang dari 15 responden atau sekitar 73% responden merupakan lulusan SMA. Tingkat pendidikan responden juga sangat mempengaruhi besarnya pendapatan seseorang responden, semakin tinggi pendidikan seseorang maka pekerjaan dan pendapatannya akan semakin layak dan meningkat, jika dikaitkan dengan umur, pendidikan dan jenis pekerjaan memiliki pengaruh yang berkaitan, (Putri, & Setiawina, 2013).

Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan dengan adanya pendidikan, masyarakat dapat belajar hal – hal baru yang akan berguna bagi diri sendiri dan berguna bagi kehidupan mereka sendiri. Pada penelitian ini, pendidikan responden sangat bervariasi mulai dari hanya menyelesaikan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama(SMP), sekolah menengah atas/ kejuruan (SMA/SMK). Berikut merupakan gambaran tingkat pendidikan responden :

4.3.3 Jenis Kelamin Responden

Menurut Akbariandhini, & prakoso (2020) Jenis kelamin dapat mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang sebab perbedaan antara laki-laki dan perempuan seperti yang telah dijelaskan dalam teori nature dan nurture dalam hal biologis, social, budaya, dan pemikiran yang dominan dimasyarakat, menciptakan pembagian kerja yang kemudian menjadi tuntunan peran, tugas, kedudukan, dan kewajiban yang berbeda antara laki- laki dan perempuan. Berikut merupakan gambaran jumlah jenis kelamin responden.

Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase %
1	Laki – Laki	12	80%
2	Perempuan	3	20%
	Total	15	100%

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 80% responden berjenis kelamin laki- laki, sedangkan responden perempuan hanya sebesar 20% saja. Data Tersebut memperlihatkan bahwa laki- laki dominan memnjadi pekerja dibandingkan dengan wanita.

4.3.5 Klasifikasi dan Identitas Responden Dalam Kelompok

Identitas didefinisikan sebagai pencerminan diri seseorang

sebagai individu yang berbeda dalam prilaku, keyakinan dan sikap. Larry A. (2009) juga menyebutkan bahwa identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan peroses sosialisasi. Dalam kelembagaan, identitas sangat penting dalam hal menentukan tingkat strata sosial seseorang dalam sebuah organisasi serta peran dan fungsi yang di dapat.

Tabel 4.5 Klasifikasi Dan Identitas Responden

No	Nama	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	Sumardi	Ketua	Persil	Aktif Menggarap lahan
2	Usman	Sekretaris	Persil	Aktif Menggarap lahan
3	Japar	Ketua Seksi Perencanaan	Persil	Aktif Menggarap lahan
4	Mastur	Ketua Seksi Pelaksana	Persil	Aktif Menggarap lahan
5	Zakaria	Ketua Seksi Pengawas	Persil	Aktif Menggarap lahan
6	Herman Subandi	Bendahara	Persil	Aktif Menggarap lahan
7	Mahsun	Anggota	Persil	Aktif Menggarap lahan
8	Qimat	Anggota	Persil	Aktif Menggarap lahan
9	P. Arifin	Anggota	Persil	Aktif Menggarap lahan
10	I. Sitah	Anggota	Persil	Aktif Menggarap lahan
11	Inak Pur	Anggota	Persil	Aktif Menggarap lahan

12	Fadli	Anggota	Persil	Aktif Menggarap lahan
13	Aq. Kumiati	Anggota	Persil	Aktif Menggarap lahan
14	Jumadil	Anggota	Persil	Aktif Menggarap lahan
15	Sahli	Anggota	Persil	Aktif Menggarap lahan

Untuk mendapatkan data yang valid dalam proses pengambilan data responden dimana terdapat kriteria dengan pertimbangan tertentu diantaranya; (1) Merupakan anggota aktif menggarap lahan, (2). Menjadi pengurus di dalam kelompok, (3). Rutin mengikuti pertemuan kelompok. Dimana dapat diketahui dari total 15 responden terdapat 6 orang atau sebesar 40% yang menjadi anggota inti atau menjadi pengurus dan sebesar 60% atau 9 orang anggota kelompok yang aktif menggarap lahan.

4.4 Kapasitas Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republic Indonesia Nomor P.57/Menhut II/2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan yang sudah di sesuaikan dengan penelitian ini. Ada tiga instrument Kriteria Penilaian Kemampuan Kelompok pengelola kawasan sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat dalam mengelola suatu kawasan sesuai dengan kebijakan pemerintah diantaranya

1. Kelola Kelembagaan

2. Kelola Kawasan

3. Kelola Usaha

Pengukuran dilakukan berdasarkan persepsi pengurus dan anggota kelompok terhadap indicator – indicator tingkat kemampuan kelompok pengelola kawasan KTH.

4.4.1 Kelola kelembagaan

Kelembagaan merupakan aspek penting dalam pengelolaan satu kawasan, karna dapat mengatur dan mengikat setiap anggota kelompok yang melakukan pengelolaan pada satu kawasan hutan. Disamping itu, kelembagaan dimaknai dengan aturan dan kebyakan yang mempengaruhi keputusan-keputusan, kemampuan membentuk struktur organisasi, adanya kemampuan lembaga untuk mengelola aktivitas dan mengembangkan prosedur sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan arahan dan kebijakan dari pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan yang telah di sesuaikan dengan penelitian ini, deskripsi mengenai tingkat kelola kelembagaan KTH Semilir II secara

spesifik dapat di lihat pada Tabel berikut ini :
Tabel 4.6 Aspek dan Indikator kelola Kelembagaan

No	Aspek dan Indikator kemampuan	Skors	Bukti Fisik
1	Dasar hukum pendirian KTH	10	Terlampir
2	Kepengurusan	30	Terlampir
3	Keikutsertaan kaum wanita dalam kepengurusan dan anggota kelompok	20	Terlampir
4	Perencanaan Kegiatan Kelompok (RKK)	0	
5	Keterlibatan pengurus dan anggota dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok	20	Terlampir
6	Pemantauan dan evaluasi kegiatan kelompok	15	Terlampir
7	Penetapan lokasi dan kelengkapan serta pengaktifan fungsi sekretariat nama KTH, papan informasi, pondok pertemuan, perpustakaan, peta wilayah kelola dll.	10	Terlampir
8	Aturan dalam kelompok yang mengikat	10	Terlampir
9	Kelengkapan administrasi kelompok dibuktikan dengan adanya : buku tamu, buku daftar anggota, buku daftar hadir pertemuan, notulen rapat, buku kas, buku tabungan, buku simpan pinjam, buku Inventaris barang, buku informasi, buku catatan hasil kegiatan	15	Terlampir
10	Frekuensi pertemuan/musyawarah KTH	10	Terlampir
11	Partisipasi dan kehadiran anggota kelompok	20	Terlampir
12	Keikutsertaan pengurus/anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan/kursus/magang) dalam 3 tahun terakhir	10	Terlampir
13	Jenis pelatihan yang diikuti pengurus/anggota (bidang teknis, kelembagaan, manajemen usaha, adminitrasi)	15	Terlampir
14	Keterlibatan KTH dalam program pemerintah /LSM Nembaga lainnya (kegiatan lomba, kampanye, gerakan-gerakan)	10	Terlampir
15	Jumlah kearifan lokal yang dikembangkan dalam kegiatan KTH	20	Terlampir
16	Keterlibatan KTH dalam program pemerintah /LSM Nembaga lainnya (kegiatan lomba, kampanye, gerakan-gerakan)	10	Terlampir
17	Jumlah kearifan lokal yang dikembangkan dalam kegiatan KTH	0	
18	Keterlibatan KTH dalam program pemerintah /LSM Nembaga lainnya (kegiatan lomba, kampanye, gerakan-gerakan)	10	Terlampir
Jumlah Total		235	

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap aspek dan indikator pada penilaian kelola kelembagaan yang telah dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Semilir II didapatkan total skor penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 sebesar 235 poin. Ada beberapa aspek dan indikator penilaian terhadap kelola kelembagaan yang telah dilakukan di KTH Semilir II sebagai mitra pengelola, aspek pada indikator dasar hukum pendirian kelompok tersebut yang telah di dasari oleh Surat Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani . Indikator penguat lainnya yaitu pada indikator kepengurusan dalam kelompok dengan nilai 30 dimana KTH semilir II sudah mempunyai kepengurusan yang lengkap dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi- seksi dengan uraian dan tugas semua berjalan sesuai fungsinya yang dilakukan pada data wawancara terhadap 15 responden yang merupakan pengurus dan anggota KTH Semilir II. Pada indikator dengan nilai 20 antara lain keterlibatan pengurus dan anggota dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok dapat dikatakan cukup penting dikarenakan keterlibatan pengurus dan anggota kelompok yang dilakukan secara maksimal akan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Selain itu dengan terlibat sepenuhnya anggota dan pengurus dalam melaksanakan tanggung jawab dan pekerjaan menjadi jauh lebih maksimal. Kemudian indikator lainnya yaitu keikutsertaan kaum wanita dalam

kepengurusan anggota kelompok, dimana ini membuktikan di dalam KTH tersebut terdapat Kesetaraan gender antara laki- laki dan perempuan dalam segi HAM dan kebebasan dipilih dan memilih maupun kebebasan berpendapat. Indikator lainnya yaitu jumlah kearifan local yang dibentuk, dimana di KTH Semilir II dikembangkan dengan cukup baik, seperti mengemas dan memasarkan hasil-hasil HHBK yang terdapat di kawasan tersebut. Didapatkan juga hasil penilaian pada indikator dengan nilai 15 antara lain pemantauan dan evaluasi kegiatan kelompok, kelengkapan administrasi kelompok, dan jenis pelatihan yang diikuti pengurus/anggota.

Selanjutnya pada indikator dengan nilai 10 point antara lain; Aturan kelompok yang mengikat, dimana aturan kelompok ini sangat penting dalam upaya mencapai tujuan visi dan misi terbentuknya kelompok tersebut, dengan adanya aturan lebih memperjelas hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seluruh anggota sehingga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Indikator lainnya yaitu frekuensi pertemuan/musyawarah kelompok tani, keterlibatan kelompok tani hutan dalam program pemerintah/LSM/Lembaga lainnya, jumlah kelompok tani baru yang terbentuk, keikutsertaan pengurus/anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelompok, dan jumlah kader pemimpin KTH(Keterlibatan generasi muda dalam KTH). Keterlibatan generasi muda dalam kepengurusan KTH di Semilir

II masih sangat minim, dikarenakan generasi muda berfikir bahwa pengahsilan yang didapatkan dari hasil pengelolaan kawasan tersebut tidak cukup bagi mereka, sehingga generasi muda enggan untuk ikut serta dalam pengelolaan KTH Semilir II dan hanya 10- 15% saja dari total anggota kelompok yang merupakan generasi muda. Dan yang terakhir penetapan lokasi dan kelengkapan, serta pengaktifan fungsi secretariat daman KTH Semilir 2 hanya memiliki peta wilayah kelola.

4.4.2 Kelola Kawasan

Selain kelola kelembagaan aspek yang penting dari sebuah pengelolaan yaitu aspek kelola

Tabel 4.7 Aspek dan Indikator kelola Kawasan

No	Aspek dan indikator Kemampuan	Skors	Bukti Fisik
1	Pemahaman terhadap batas-batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan disekitarnya	30	Terlampir
2	Penataan dan pemetaan wilayah kelola	30	Terlampir
3	Pengenalan potensi dan daya dukung wilayah kelola	30	Terlampir
4	Identifikasi dan pemetaan permasalahan wilayah kelola dan kawasan hutan disekitarnya	10	Terlampir
5	Pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi	10	Terlampir
6	Aktifitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi (penanaman lahan Kritis kosong/ tidak produktif, lurus jalan, kanan kiri sungai dll)	10	Terlampir
7	Aktifitas kelompok dalam melakukan konservasi sumber daya hutan (perlindungan mata air, penangkaran flora dan fauna, pemanfaatan jasa lingkungan dll)	10	Terlampir
8	Dampak terhadap peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan dan lingkungan (terbentuknya kelompok / organisasi peduli kehutanan)	0	

kawasan. Dalam pengelolaan kelola kawasan dikatakan penting dikarenakan kelola kawasan meliputi pemahaman terhadap batas wilayah kelola, aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi, pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi, peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam pelestarian hutan dan konservasi sumber daya alam, sehingga kawasan dapat dikelola dengan baik dan maksimal. Berikut penilaian kapasitas kelembagaan pada aspek dan indikator kemampuan dalam kelola kawasan yang ada di KTH Semilir II dapat di lihat pada tabel 4.6 dibawah ini :

9	Dampak terhadap lingkungan (penambahan sumber mata air, pengurangan lahan kritis, pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan kebakaran hutan dll)	10	Terlampir
10	Perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHBML/SVLK dan lainnya)	0	
Total Skors			140

Berdasarkan hasil analisis yang di lakukan pada aspek dan indikator kelola kawasan didapatkan total skor penilaian yaitu 140 poin . Total skor kelola kawasan di peroleh dari beberapa indikator. Dimana indicator dengan total skor 30 poin Antara lain yaitu indikator pemahaman terhadap batas-batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan disekitarnya, Penataan dan pemetaan wilayah kelola, Pengenalan potensi dan daya dukung wilayah kelola serta indikator indikator lainnya yang menentukan tingkat kelola kawasan KTH Semilir II dan potensi yang ada. Ada beberapa indikator penilaian 10 poin antara lain, aktifitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi (penanaman lahan Kritis kosong/ tidak produktif, turus jalan, kanan kiri sungai dll). Beberapa indikator tersebut dapat dikatakan indikator yang cukup penting bagi pengelolaan kawasan yang lestari. Pada indikator pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi cukup penting dikarenakan pemanfaatan kawasan sesuai dengan potensi yang ada secara maksimal dapat memberikan kebermanfaatn pagi pengelola serta dapat menjaga kawasan tetap lestari karena kawasan di manfaatkan

sebagaimana semestinya tanpa merusak kawasan tersebut.

Selanjutnya Dampak terhadap lingkungan (penambahan sumber mata air, pengurangan lahan kritis, pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan kebakaran hutan dll) indicator ini menilai sejauh mana dampak lingkungan yang diberikan dari pengelolaan kawasan tersebut bagi kehidupan masyarakat disekitarnya. Kelompok pengelola dalam melaksanakan pengelolaan suatu kawasan, baik itu kawasan hutan yang diperuntukan sebagai kawasan yang boleh dikelola atau tidak. Dimana para petani memiliki hak untuk mengelola kawasan hutan sebagai tempat bercocok tanam tetapi juga memiliki kewajiban dalam pelestarian hutan. Salah satunya dengan rehabilitasi lahan baik itu menanam pohon dan menjaga kebersihan di sekitar kawasan. Tetapi juga ikut andil dalam pelestarian flora dan fauna yang ada pada sekitar kawasan, serta ikut andil dalam menjaga mata air yang ada sehingga satwa yang ada pada kawasan tetap terjaga. Dampak yang ditimbulkan oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan salah satunya yaitu adanya pengurangan lahan kritis, pelestarian

keanekaragaman hayati serta berkurangnya tingkat kebakaran hutan yang ada pada kawasan kelola.

Adapun indicator dengan nilai 0 poin yaitu dampak terhadap peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelesatirian hutan dan lingkungan, dimana ini dibuktikan dengan belum adanya terbentuk kelompok/ organisasi peduli hutan yang ada di KTH tersebut ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelesatirian hutan di wilayah tersebut. Selanjutnya perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari, indicator ini juga mendapatkan nilai 0 poin, karena di KTH semilir II sendiri belum mendapatkan PHBML/SVLK selama KTH ini terbentuk.

Tabel 4.8 Aspek dan indikator kelola usaha

No	Aspek Dan Indikator Kemampuan	Skors	Bukti Fisik
1	Modal awal kelompok	30	Terlampir
2	pertambahan modal usaha dalam 3 tahun	0	
3	Sumber penambahan modal usaha	0	
4	Penambahan jenis usaha dalam 3 tahun	0	
5	Penyelenggaraan temu usaha KWA dengan pelaku usaha	0	
6	Pertambahan kemitraan dengan perjanjian /MoU dalam 3 tahun	0	
7	Cakupan tujuan pemasaran hasil usaha kelompok	0	
8	Peningkatan pendapatan kelompok	25	Terlampir
9	Pemanfaatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber (instansi teknis, lembaga penelitian)	25	Terlampir
10	Penambahan penyerapan tenaga kerja dari usaha kelompok	0	
Jumlah Total Nilai			80

4.4.3 Kelola Usaha

Faktor penting dalam pengelolaan kehutanan bukan hanya pada factor kelola kawasan maupun kelola kelola kelembagaan, namun juga factor penting lainnya yaitu kelola usaha. Dikarenakan dalam pengelolaan kehutanan bukan hanya melestarikan tetapi juga bias memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar hutan dan ikut mengelola kawasan hutan secara lestari.

Banyaknya kearifan local yg di kelola oleh KTH Semilir II seperti kopi, durian, alpukat, Dll. dapat menciptakan peluang usaha baru bagi KTH yang mengelola kawasan. Berikut Deskripsi mengenai penilaian kaspasitas kelembagaan KTH Semilir II dalam factor usaha dapat dilihat pada table 4.7 berikut :

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa jumlah total penilaian didapatkan bernilai 80 poin. Ada beberapa kategori dari aspek dan indikator penilaian berdasarkan nilai atau skor yang diperoleh setiap indikator penilaian yang ada. Yang pertama indikator yang bernilai 30 yaitu indikator modal awal kelompok. Modal awal pada pembentukan kelompok dan inprastruktur yang ada pada kawasan pengelolaan menggunakan 100 persen dana kelompok yang dikumpulkan secara swadaya oleh pengelola yang ada.

Kemudian untuk indikator yang bernilai 25 poin antara lain yaitu indikator peningkatan pendapatan kelompok, pemanfaatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber (instansi teknis, lembaga penelitian), Pada pengelolaan yang ideal selayaknya pada pendapatan kelompok mengalami peningkatan, akan tetapi pada pengelolaan yang dilakukan oleh KTH Semilir II juga mendapatkan peningkatan pendapatan kelompok tetapi tidak secara signifikan hanya sekitar 30% - 40% saja dikarenakan kecilnya luas wilayah yang dikelola.

Kemudian salah satu indikator penting dalam kelola usaha yaitu indikator pemanfaatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber (instansi teknis, lembaga penelitian), dalam sistem pengelolaan suatu kawasan memang diperlukan adanya pemanfaatan akses informasi dalam melakukan pengelolaan yang baik dan benar. Dalam pelaksanaan KTH Semilir II sudah cukup baik dalam memanfaatkan akses informasi

yang ada yaitu sebanyak 2-5 akses informasi yang dimanfaatkan oleh pengelola.

Selain adanya aspek indikator yang dikatakan berhasil dalam sistem pengelolaan yang telah dilakukan oleh KTH Semilir II, ada juga aspek dan indikator yang belum mampu dilaksanakan secara maksimal (bernilai 0) oleh KTH Semilir II tersebut. Aspek dan indikator tersebut antara lain: Pertambahan modal usaha dalam 3 tahun, sumber penambahan modal usaha, penambahan jenis usaha 3 tahun, penyelenggaraan temu usaha KTH, penambahan kemitraan dengan perjanjian/MoU, cakupan tujuan pemasaran hasil usaha dan yang terakhir penambahan penyeroran tenaga kerja dari usaha kelompok.

Adanya penambahan modal usaha dirasa cukup penting bagi pengelolaan kawasan, dengan adanya penambahan modal bagi pengelola, dari segi pemasaran akan sangat membantu para petani contohnya dari segi pengemasan, dimana itu akan menaikkan harga jual dan daya saing barang tersebut selain itu ada juga indikator yang dinilai kurang maksimal pada system pengelolaan KTH Semilir II dimana indikator itu yakni pertambahan kemitraan dengan perjanjian/MoU dalam 3 tahun

4.5 Analisis Kapasitas Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014. Tentang pedoman pembinaan kelompok tani hutan yang telah disesuaikan dengan penelitian kali bahwa

penilaian kemampuan KTH Semilir II dalam melaksanakan pengelolaan dilakukan dalam bentuk skoring dengan menggunakan instrument kriteria penilaian kemampuan kelompok pengelola dengan ketentuan

a. Dibawah 350 : Kelas pemula

b. 350- 700 : kelas Madya

c. Diatas 700 : Kelas Utama

Deskripsi mengenai analisa dan sintesis kapasitas kelembagaan KTH Semilir II secara spesifik dapat dilihat pada table 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9 Analisa dan sintesis kapasitas kelembagaan KTH Semilir II

No	Instrumen Aspek dan Kriteria Penilaian Kemampuan KTH Semilir II	Skoring
1	Kelola Kelembagaan	235
2	Kelola Kawasan	140
3	Kelola Usaha	80
Total Skors		455

Klasifikasi kelas kelompok KTH Semilir II berdasarakan hasil penilaian kemampuan KTH Semilir II dalam pelaksanaan kelola kelmbagaan dengan nilai skor 235, kelola kawasan 140, dan kelola usaha dengan skors 80. Total skor keseluruhan pada klasifikasi KTH Semilir II sebesar 455 poin. Dari total skor yang diperoleh maka KTH Semilir II dapat dikategorikan pada kelas Madya.

Syarat sebagai Kelompok Tani Hutan Madya sendiri yakni telah melakukan berbagai kegiatan, dan memiliki kelengkapan organisasi dan memiliki wadah organisasi usaha kelompok walaupun belum berjalan. Dimana dari sisi aspek kelembagaan KTH Semilir II memiliki kelembagaan yang cukup bagus, dimana KTH Semilir II dari sisi kelembagaan mendapat skors 235 point, walaupun masih banyak yang harus di perbaiki misalnya membuat RKK(Rencana Kegiatan Kelompok) yang belum ada dimana tujuanya untuk

mengorganisir kegiatan yang harus dilakukan oleh anggota secara terstruktur sehingga tujuan yang diinginkan bisa tercapai, selain itu juga pengembangan kearifan local masih belum efektif, karena kurangnya peran pemerintah dan pihak terkait dalam pengembangan kearifan local yang ada dikawasan tersebut. Berdasarkan peraturan menteri kehutanan nomor 57 tahun 2014 menyebutkan kelembagaan menjelaskan pembagian tugas, peran, tanggung jawab dan wewenang masing- masing pengurus. Pada aspek kelembagaan, peraturan tersebut lebih menekankan pada struktur organisasi daripada aturan main itu sendiri. Penjelasan terkait kelembagaan sebagai aturan main dijelaskan pada aspek kelola kawasan dan kelola usaha. Menurut Schmid (2004), kelembagaan merupakan sejumlah peraturan yang berlaku didalam sebuah masyarakat, kelompok, atau komunitas yang mengatur hak,

kewajiban, tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Menurut peraturan menteri kehutanan republic Indonesia nomor 57 tahun 2014 menyebutkan kelas madya lebih memprioritaskan kelola kawasan, dimana KTH Semilir II dari sisi kelembagaan memiliki skor yang cukup baik yakni 140 point dimana dari sisi kelola kawasan KTH Semilir II sudah melakukannya dengan cukup baik dimana semua anggota kelompok memahami batas wilayah, sudah memiliki peta kelola kawasan, hal ini sesuai dengan pengelolaan kelembagaan yang sudah cukup baik di lakukan oleh KTH Semilir II. Walaupun dari sisi kelola kawasan masih banyak yang harus tingkatkan dan di perbaiki seperti belum adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan, dimana dibuktikan dengan adanya pembentukan organisasi peduli hutan sehingga pengelolaan kawasan dapat optimal dan lestari secara *sustainable*. Oleh karena itu KTH Semilir II belum mendapatkan sertifikasi PHBML/SVLK dan lainnya.

Selain itu dari aspek usaha peraturan menteri kehutanan republic Indonesia nomor 57 tahun 2014 untuk kelas madya diharuskan memiliki wadah organisasi usaha walaupun belum berjalan dimana di KTH Semilir II dibuktikan dengan adanya Swadaya Murni yang dilakukan sebagai modal awal kelompok yang tertuang dibuku KAS kelompok dimana untuk iurannya dilakukan setiap bulan, dan juga adanya penambahan dari sisi taraf ekonomi masyarakat sekitar 25-50%

dari hasil penjualan HHBK yang ada dikawasan tersebut. (Kumala 2017) juga menyebutkan dalam penelitiannya pendapatan rata- rata KTH yang ada di Karang Sidemen hanya Rp. 2.484.437 .- pertahunnya, atau sekitar Rp. 200.000- 300.00 .- perbulan. ini masih jauh di rata- rata taraf kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. Sehingga Nandini (2013) menyebutkan bahwa banyaknya pemegang IUPHKM yang memindah tangankan hak pengelolanya. padahal potensi yang terdapat di HKm karang sidemen sangat beragam seperti Durian, Nangka, Pisang, dan Alpukat. Serta memiliki daya tarik ekowisata (Murdianto, Dkk, 2021)

Hal ini sesuai dengan tingkat kesadaran bahwa apabila pengelolaan tersebut dilakukan secara maksimal maka kawasan tersebut akan menjadi semakin berkembang dan *sustainable*. Namun dengan minimnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal pengembangan bisnis atau usaha dimana indicator ini memiliki potensi besar bagi masyarakat dalam hal mensejahterkan kehidupan masyarakat pengelola, oleh karena itu diperlukan adanya penguatan pada kelola usaha pada KTH Semilir II.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka didapatkan kesimpulan yaitu berdasarkan peraturan menteri kehutanan republic Indonesia Nomor 57 tahun 2014

tentang pedoman pembinaan kelompok tani hutan yang telah disesuaikan dengan penelitian ini, maka didapatkan skor total masing-masing aspek. Dimana aspek kelola kelembagaan mendapatkan skor total sebesar 235 poin, untuk aspek kelola kawasan sebesar 140 poin, dan yang terakhir aspek kelola usaha sebesar 80 poin. Sehingga dari ketiga aspek tersebut didapatkan nilai total sebesar 455 poin, dimana dari perolehan skor total ketiga aspek tersebut KTH Semilir II diketahui tingkat kapasitas pengelolaannya dapat dikategorikan sebagai kelas Madya.

Adapun faktor pendukung diantaranya : (1). Dari segi kelembagaan KTH Semilir II 'sudah cukup lengkap yaitu dari struktur kepengurusan. (2). Dari segi kelola wilayah dimana semua anggota sudah memahami batas-batas wilayah. (3). Dari segi usaha para anggota berusaha mengembangkan produk lokal yang ada di kawasan. Sedangkan faktor penghambat yakni : (1). Dari segi kelembagaan kurangnya koordinasi antara pengurus inti dengan anggota kelompok. (2). Dari segi wilayah kurangnya ketegasan dan control terhadap wilayah kelola para anggota. (3). Dari segi usaha masih kurangnya peran pemerintah dan stakeholder dalam upaya mengembangkan kearifan lokal yang ada di kawasan tersebut.

5.2 saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka didapatkan saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait kapasitas

kelembagaan dalam upaya mendukung pengelolaan KTH Semilir II secara *suistnable*

2. perlunya peran pemerintah dalam segi sector usaha untuk memaksimalkan pendapatan para anggota Semilir II ditengah keterbatasan lahan yang dikelola

3. perlu dilakukan lagi pengembangan dan memaksimalkan masyarakat dalam pengelolaan kearifan local yang ada dikawasan dalam upaya peningkatan kapasitas dari segi aspek ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani D. Westoby, J.C. 2013. Changing Objectives Of Forest Management. Assres to Ninth Commonwealth Forestry Conference, New Delhi.
- Awang, San Afri., Wahyu Tri Widayanti. 2008. Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Montpellier, France: French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD), Bogor, Indonesia: Center for International Research (CIFOR), dan Yogyakarta, Indonesia: — PKHR Fakultas Kehutanan UGM.
- Cahyaningsih, Nurka., Gamal Pasya, Warsito. 2010. HKm Lampung Barat: Panduan Cara memproses Perijinan dan Kiat Sukses menghadapi Evaluasi. World Agroforestry Centre Asia Tenggara dan —

- Dinas Kehutanan dan PSDA Lampung Barat.
- Hakim I., S. Irawanti, Murniati, Sumarharni, A. Widiarti, R. Effendi, M. Muslich, Sri. Rulliaty. 2010. Social Forestry: Menuju Masyarakat Sejahtera. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- KEMENLHK, 2015. Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2014. Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- Kumala Aprida. 2017. Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Kemasyarakatan Di Desa Karang Siemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. S1 Thesis Universitas Mataram
- Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. Mcdaniel. 2009. Comunication Between Cultures. Cengage Learning. ISBN: 04955674422
- Markum, Budhy Setiawan, Rahmat Sabani. 2015. Hutan Kemasyarakatan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Mataram : RA Visindo.
- Milen, Anelli, (2004) Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta : Pondok Pustaka Jogja.
- Murianto, 2021. Identifikasi Potensi Pengembangan Ekoswisata Desa Karang Sidemen Untuk Mendukung Keberlanjutan Di Lingkar Geopark Lombok Tengah :Hospitaly 79
- Nandini, Ryke. 2013. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Pulau Lombok. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol. 10 No. 1, Maret 2013: 43-55,
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.57/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman — Pembinaan Kelompok Tani Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.88/Menhut-I/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.4MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2023 Tentang Perhutanan Sosial.
- Perum Perhutani, 2001. Keputusan Direksi Perum Perhutani Tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Jakarta: Perum Perhutani
- Puri, A. D., & Setiawina, D. (2013). Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Desa Bebandem.

- Yogyakarta, Literasi Media Publishing..
- Rahmina, Yanti Sofia, Edy Marbyanto,
 Ali Mustofa. 2012. Tata Cara dan Prosedur Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-undang No. 41 Tahun 1999. GIZ dan FORCLIME
- Sanjaya, Rizki., Christine., Susni Herawanti. 2017. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera Di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari* Vol.5 No.2, April 2017 (30—42)
- Schmid, A. A. (2004) *Conflict and Cooperation Institutional and Behavioral Economics*. Inggris: Blackwell Publishing.
- Siyoto. S & Sodik, Muhammad Ali , 2015. *Dasar Metodologi penelitian*, Yogyakarta. Literasi Media Publishing.
- Soeprapto, H. R. Riyadi, (2003) ³Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Sudarsono, Dwi. 2016. Panduan Monitoring dan Evaluasi PHBM. SAMANTA. Mataram.
- Suratiyaniningrum. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM) LMDH Wana Bumi Tirta Makmur, Desa Banjaranyar, BKPH Margasari, KPH Balapulung, Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah. Repository IPB. Skripsi.
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian pendidikan :Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung. ALFABETA.